
Gaya Kepemimpinan Kapolri dan Nilai Karakter Pada Masa Kemerdekaan Sampai Orde Baru (Tahun 1945-1998)

Sutrisno

Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, Indonesia

ABSTRACT

The aim of this research is to find out the leadership styles, character values, work achievements and policies adopted by the 5 (five) National Police Chiefs from the independence period to the New Order. The method used is a qualitative descriptive method, namely evaluating the opinions, attitudes, and perspectives of experts and figures associated with the research variables. The results of this study indicate that the leadership styles and character values of the five former National Police Chiefs above are exemplary, applying the spirit of the corps. disciplined, firm, brave, persistent, unyielding, committed to his profession, and with a high spirit of nationalism. The results and work achievements cover the fundamentals of the Polri institution, as well as the formation of the POLRI organization. and protect the community; the formation of the Rapid Reaction Unit, the expansion of Polri institutions according to the number of existing provinces. System and policy legacies include: Corps spirit, Police school, "Bhayangkara", Tri Brata motto, Water Police Unit, Air Police, Traffic Police, NCB Intepol crime laboratory and Women Police, Headquarters organizational structure, eradication of various crimes, attitudes serving the community, Samsat, patterns of eradicating corruption, Police slogans, and the implementation of the Rapid Reaction Unit.

Key Words: Perception of learning media, self-confidence, social studies learning achievement

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Gaya kepemimpinan, nilai karakter, prrestasi kerja dan kebijakan yang diterapkan oleh ke 5 (lima) Kapolri pada masa kemerdekaan hingga Orde Baru. Metode yang digunakan adalah metoda deskriptif kualitatif yaitu mengevaluasi pendapat, sikap, dan perspektif para ahli dan tokoh yang terkait dengan variabel penelitian. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Gaya kepemimpinan dan nilai karakter ke lima mantan Kapolri di atas adalah keteladanan, menerapkan semangat korps. disiplin, tegas, berani, gigih, pantang menyerah, komit terhadap profesinya, dan dengan jiwa nasionalisme tinggi. Hasil serta prestasi kerja meliputi fundamen institusi Polri, serta pembentukan organisasi Polri Perubahan organisasi di tingkat Mabes, dan kebijaksanaan ikut berperan dalam Polisi Internasional Pembentukan Samsat, pemberantasan peredaran narkoba, serta mengungkap kasus korupsi memantapkan kedudukan dan tugas satuan Brigade Mobil dan sikap melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat; pembentukan Satuan Unit Reaksi Cepat, Pemekaran kelembagaan Polri sesuai dengan jumlah propinsi yang ada. Warisan sistem dan kebijakan meliputi: Semangat korps, Sekolah kepolisian, "Bhayangkara", semboyan Tri Brata, Satuan Polisi Perairan, Polisi Udara, Polisi Lalu Lintas, laboratorium kriminal NCB Intepol dan Polisi Wanita., Struktur organisasi Mabes, pemberantasan berbagai tindakan kejahatan, sikap melayani masyarakat, Samsat, pola pemberantasan korupsi, slogan Kepolisian, serta pelaksanaan Satuan Unit Reaksi Cepat.

Kata Kunci: Persepsi atas media pembelajaran, rasa percaya diri, prestasi belajar IPS

Penulis Korespondensi: (1) Sutrisno, (2) Fakultas Pascasarjana, Universitas Indraprasta PGRI, (3) Jl. Nangka No.58c Tanjung Barat Jagakarsa, Jakarta Selatan, Indonesia, (4) Email: abiaksyafaa2548@gmail.com

Copyright © 2021. The Author(s). Published by Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, Indonesia. This is an open access article licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam rangka membentuk Negara Indonesia yang berdaulat dan di akui oleh bangsa lain di dunia, setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, pemerintah memben- tuk Institusi Kepolisian R.I. Melalui Panitia Persiapan Kemerdekaan me- mutuskan Kepolisian R.I sebagai bagian dari Kementrian Dalam negeri RI seperti dalam masa pendudukan jepang. Hal ini karena merupakan taktik dalam perjuangan kemerdekaan sehingga Kepolisian juga merupakan pejuang Kemerde- kaan. Mengingat ancaman tentara belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia.

Untuk menjalankan tugas Kepolisian dimana saat itu masih serba terbatas pada semua aspek maka diperlukan gaya kepemimpinan Polri yang memiliki nilai karakter sesuai dengan keadaan pada saat itu.

Kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi orang lain agar mau mengerjakan dan mengikuti gagasannya. Secara umum kepemimpinan diartikan sebagai sebuah sarana atau suatu proses dalam suatu organisasi untuk membujuk orang lain agar bersedia melakukan sesuatu secara sukarela dalam mencapai sasaran organisasi. Definisi dasar tersebut, sangat cocok untuk keadaan Polri masa lalu dimana seorang pemimpin harus mampu membangkitkan semangat patriotik.

Stoner & Edward (1992:42) mengatakan bahwa kepemimpinan mengandung tiga implikasi penting yaitu: (1) kepemimpinan itu melibatkan orang lain baik itu bawahan maupun pengikut, (2) kepemimpinan melibatkan pendistribusian kekuasaan antara pemimpin dan anggota kelompok secara seimbang, karena anggota kelompok bukanlah tanpa daya, (3) adanya kemampuan untuk menggunakan berbagai bentuk kekuasaan yang berbeda-beda untuk mempengaruhi tingkah laku pengikutnya dengan berbagai cara.

Pembinaan karakter tidak harus diberikan secara langsung kepada siswa, namun dapat dikaitkan dengan materi ajar. Pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial pembinaan karakter dapat dikaikan pada mata pelajaran seperti sejarah, kewarga- negaraan, prakarya, agama dan lain sebagainya. Disamping itu juga perlu dicarikan suatu pola atau cara menerapkan pendidikan karakter agar efektif mencapai tujuan sesuai dengan criteria karakter yang baik.

Fitri (2012) mengungkapkan bahwa pendidikan karakter dapat diintegrasikan dalam pembelajaran pada setiap mata pelajaran. Materi pembelajaran yang berkaitan dengan norma dan nilai-nilai pada setiap mata pelajaran perlu dikembangkan, dieksplisitkan, dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari. Karena itu pembelajaran nilai-nilai karakter seharusnya tidak hanya diberikan pada arah kognitif saja, tetapi harus menyentuh pada internalisasi dan pengamalan nyata dalam kehidupan siswa. Pembinaan karakter menjadi sesuatu penting untuk membentuk generasi yang berkualitas. Pendidikan karakter merupakan salah satu alat untuk membimbing seseorang menjadi orang baik, sehingga mampu menyaring pengaruh yang tidak baik.

Tidak mudah untuk memimpin dan menangani institusi besar seperti Polri yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Diperlukan kepemimpinan yang mampu menginspirasi generasi berikutnya, menciptakan sistem kepolisian yang sesuai dengan masanya, semakin mantapnya tugas yang di emban khususnya pada saat awal pembentukan institusi Polri pada tahun 1945 s.d 1960an. Pimpinan Polri juga harus mampu melahirkan pemimpin yang tidak sekedar memiliki power dan mempunyai banyak pengikut, akan tetapi harus diikuti dengan kemampuan pemikiran konseptual. Sedangkan cara berfikir konseptual itu sendiri diperoleh dari tempaan pengalaman berdinis maupun pengalamannya sendiri.

Pada era sebelum orde baru, keamanan dalam negeri diartikan sebagai ancaman bersenjata terhadap keamanan Negara yakni kedaulatan dan ketuhan wilayah. Namun sejak masa order baru, istilah keamanan dalam negeri diartikan sebagai keamanan publik. Sehingga fungsi utama Polri adalah menjaga keaman- an dan ketertiban masyarakat. Se- dangkan ancaman dari militer Negara lain menjadi tugas TNI. Selanjutnya pada era reformasi saat ini, tugas dan tanggung jawab Polri diatur dalam Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara pasal 1 huruf 6 yaitu

bahwa keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat (Habibie Center 2001:163).

Semakin jelasnya tugas Kepolisian dari masa ke masa tentu saja tidak lepas dari usaha dan kepemimpinan Kapolri sebelumnya. Pendapat Funk & Wagnalis (1961:559) menjelaskan bahwa keadaan dewasa ini diakibatkan dari perkembangan masa lampau. Yang dimaksud perkembangan masa lampau tentu saja adalah hasil usaha dari Kepimpinan kapolri pada masa sebelum orde baru yang dapat dirasakan hingga saat ini. Contoh kongkrit dari pendapat Funk dan Wagnalis ini adalah lahirnya Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjelaskan esensi penting mengenai peran, fungsi dan tugas pokok Polri, yaitu: a. Kepolisian Negara R.I merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. b. Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. c. Kepolisian Negara R.I bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa kepemimpinan di masa lampau mampu memberi inspirasi dan sumbangan pemikiran kepada peningkatan dan pengembangan system kepolisian di masa kini. Tugas Polri sebagai lembaga yang melindungi dan mengayomi masyarakat dimulai oleh Kapolri ke 6 yaitu bapak Hoegeng. Dimana tugas melindungi dan mengayomi masyarakat menjadi salah satu isi tugas pokok yang dituangkan dalam Undang-undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 pasal 13 bahwa tugas pokok polisi adalah; a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, b) menegakkan hukum dan c) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Inspirasi lain yang diberikan oleh Kapolri terdahulu yaitu Jenderal Widodo Budidarmo (Kapolri ke 7) adalah Pelayanan terhadap masyarakat tentang pengurusan surat-surat kendaraan bermotor menjadi satu atap. Ide pendirian kantor bersama tiga instansi yang kini lebih dikenal dengan sebutan Sistem Manunggal Satu Atap (Samsat) di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Ketiga instansi itu adalah Polri, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Jasa Raharja. Mereka sepakat membuka kantor seataap di Polda Metro Jaya. Program bersama ini dioperasikan dalam rangka pengurusan surat-surat kendaraan bermotor, seperti STNK dan BPKB.

Jenderal Polisi (Purn) Soetjipto Joedodihardjo yang menjabat sebagai Kapolri ke 4 yaitu mulai 9 Mei 1965 hingga 8 Mei 1968. Dalam kepemimpinan Joedodihardjo mulai berdiri Akademi Angkatan Kepolisian (1 Oktober 1965). Namun, pada 16 Desember 1965, pendidikan akademi itu disatukan ke dalam pendidikan ABRI, dan namanya menjadi AKABRI Bagian Kepolisian. Dan masih banyak lagi gaya kepemimpinan Kapolri terdahulu yang pada masa sekarang dilanjutkan atau dikembangkan agar Polri lebih baik,

Disamping gaya kepemimpinan yang kuat, pimpinan Polri, dalam hal ini Kapolri juga harus memiliki nilai karakter. Karakter berkaitan dengan kepribadian. Karakter melibatkan sebuah standar moral dan melibatkan sebuah pertimbangan nilai.

Nilai karakter sangat penting bagi pimpinan Polri, mengingat sikap atau perbuatan yang ditunjukkan akan menjadi tauladan bagi staf dan anggotanya. Karakter kebayangkaraan yang merupakan karakter yang harus menyatu sebagai seorang Polri. Di dalam karakter tersebut memiliki nilai-nilai Brata Dedikasi Sejati. Dimana terdapat nilai-nilai yang wajib ada dalam diri seorang Polri. Nilai-nilai tersebut yang juga menjadi dasar adanya usaha pembentukan kebiasaan baik, jujur, disiplin, menunjukkan nilai-nilai ketuhanan.

Citra polisi ditentukan bukan hanya oleh cara-cara mengatasi masalah, tetapi juga bagaimana sikap pribadi kepelayanan yang ditunjukkannya, antusiasme, keseriusan, kerendahan hati,

semangat dan kejujurannya. Bahkan keberedaannya Polisi nyata di jalanan dan lapangan secara terus menerus terlihat oleh masyarakat yang telah memberikan arti pencitraan sendiri.

Dirjen Pendidikan Agama Islam, Kementerian Agama R.I (2010) mengemukakan bahwa karakter dapat diartikan sebagai totalitas ciri-ciri pribadi yang melekat dan dapat diidentifikasi pada perilaku individu yang bersifat unik, sehingga dapat membedakan antara satu individu dengan yang lainnya. Dari uraian-uraian di atas jelas bahwa karakter sangat erat dengan kepribadian individu. Meskipun karakter setiap individu ini bersifat unik, karakter-istik umum yang bersifat stereotipe dari sekelompok masyarakat dan bangsa dapat diidentifikasi sebagai karakter suatu komunitas tertentu atau dapat pula dipandang sebagai karakter suatu bangsa. Mulyasa (2011:4) mengatakan bahwa istilah karakter berkaitan erat dengan kepribadian seseorang, sehingga ia bisa disebut orang yang berkarakter (*a person of character*) jika perilakunya sesuai dengan etika atau kaidah moral. Lickona dalam Marzuki (2012:21) menjelaskan bahwa, karakter adalah: **“a reliable inner disposition to respond to situation in a morally good way”**, yang artinya suatu watak terdalam untuk merespon situasi dalam suatu cara yang baik dan bermoral. Selanjutnya Lickona menambahkan, **“character so conceived has three interrelated parts: moral knowing, moral feeling and moral behavior”**, yang artinya karakter tersusun ke dalam tiga bagian yang saling terkait, yaitu pengetahuan tentang moral, perasaan bermoral, dan perilaku bermoral.

Seorang pemimpin mempunyai sifat, kebiasaan, temperamen, watak dan kepribadian sendiri yang unik dan khas sehingga tingkah laku dan gayanya yang membedakan dirinya dari orang lain. Gaya atau *style* hidupnya ini pasti akan mewarnai perilaku dan tipe kepemimpinannya. Kepemimpinan merupakan kekuatan aspirasional, kekuatan semangat, dan kekuatan moral yang kreatif, yang mampu mempengaruhi para anggota untuk mengubah sikap, sehingga mereka searah dengan kemauan dan aspirasi pemimpin.

Peranan pimpinan merupakan salah satu kunci bagi keberhasilan dalam suatu institusi apalagi institusi negara. Agar dapat mewujudkan penyelenggaraan layanan institusi Kepolisian pada masyarakat maka diperlukan Komitmen yang tinggi bagi setiap pimpinan beserta anggota kepolisian lainnya. Yang berarti bahwa pimpinan Polri harus dapat mendorong anggotanya untuk bekerja dengan baik. Sepanjang keberadaan Polri sejak masa proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga sekarang telah mengangkat 25 Putra-putra terbaik Indonesia dari Jenderal R.S Soekanto Kapolri Pertama hingga Jenderal Polisi Lystio Sigit Prabowo, Msi. Kapolri saat ini.

Secara garis besar Kepolisian RI hingga sekarang ini telah melewati beberapa masa yaitu 1). Periode 1945-1950, 2). Periode 1950-1959, 3) Periode 1959 s.d 1965 (orde lama), 4) Periode 1966 s.d 1998 (orde baru), dan 5) Periode 1999 hingga sekarang (masa reformasi). Pada tahun 1945 s.d 1998 telah terjadi banyak peristiwa penting yang menjadikan Kepolisian RI lebih profesional seperti sekarang ini.

Secara rinci para pimpinan Polri hingga 1998 adalah sebagai berikut: Pada periode tahun 1945 hingga 1959 di pimpin oleh 1 (satu) Kapolri yaitu Komisari Jenderal Polisi R.S Soekanto Tjokrodiatmodjo 29 September 1945 s.d 14 Desember 1959, pada periode 1959 s.d 1965 (orde lama) di pimpin 2 (dua) Kapolri yaitu Komisaris Jenderal Polisi Soekarno Djojonegoro (14 Desember 1959 s.d 30 Desember 1963), dan Jenderal Polisi Soetjipto Danoekoesoemo (30 Desember 1963 s.d 8 Mei 1965). Adapun pada periode orde baru dipimpin oleh 10 (sepuluh) Kapolri yaitu: 1. Jenderal Polisi Soetjipto Joedodihardjo (9 Mei 1965 s,d 15 Mei 1968), 2. Jenderal Polisi Hoegeng Imam Santoso (15 Mei 1968 s.d 2 Oktober 1971), 3. Jenderal Polisi Mohamad Hasan (3 Oktober 1971 s.d 24 Juni 1974), 4. Jenderal Polisi Widodo Budidarmo (26 Juni 1974 s,d 25 September 1978) 5. Jenderal Polisi Awaluddin Djamin (26 September 1978 s.d 3 Desember 1982), 6. Jenderal Polisi Anton Soedjarwo (4 Desember 1982 s,d 6 Juni 1986), 7. Jenderal Polisi Mochammad Sanoesi (7 Juni 1986 s.d 19 Februari 1991), 8. Jenderal Polisi

Kunarto (20 Februari 1991 s.d 5 April 1993), 9. Jenderal Polisi Banurusman Astrosemitro (6 April 1993 s.d 14 Maret 1996), dan 10. Jenderal Polisi Diby Widoyo (15 Maret 1996 s.d 28 Juni 1998).

Dari Kapolri Jenderal Soekanto hingga Jenderal Polisi Diby Widoyo tersebut masing-masing memiliki gaya kepemimpinan serta nilai karakter yang berbeda. Adapun Nilai karakter Polri yang mereka tunjukkan sangat tepat sesuai dengan masanya mereka berbakti. Meskipun gaya kepemimpinan mereka berbeda, namun mereka memiliki satu kesamaan yaitu mengembangkan dan meningkatkan pelayanan institusi Polri dengan cara mereka masing-masing.

Institusi Polri dan Kedudukannya

Polri adalah salah satu lembaga pemerintahan Indonesia. Polri dibentuk oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 19 Agustus 1945 2 (dua) hari setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan-nya. Pada awalnya Polri disebut BKN (Badan Kepolisian Negara) pada masa-masa selanjutnya disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam perkembangannya hari jadi Polri (Hari Bhayangkara) adalah tanggal 1 Juli melalui yaitu sejak adanya ketetapan pemerintah tahun 1946 No. 11/S.D. yang mengatur tugas dan tanggung jawab Institusi (Jawatan) Kepolisian Negera Republik Indonesia.

Dasar hukum Polri adalah UUD 45, namun dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Polri di atur dalam peraturan yang dikeluarkan pemerintah melalui Kepres presiden. Selanjutnya ketetapan mengenai stutus Polri pada masa itu dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Sementara RI Tahun 1950 pasal 130 yang bunyinya adalah: “untuk memelihara ketertiban dan keamanan umum diadakan alat kekuasaan kepolisian yang diatur dalam undang-undang.

Fungsi dan Tugas Pokok Polri

Polri bertanggung jawab untuk menciptakan suatu keadaan yang tertib, tenteram, dan teratur dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Polri merupakan alat Negara yang berperan dalam memujudkan keamanan dan ketertiban, memegang kewenangan dan kendali penuh terhadap pencapaian tujuan terwujud nya Kamtibmas yang kondusif.

Polri memegang peranan penting dan strategis dalam penegakan hukum. Proses penegakan hokum biasa dimulai oleh Polri sebagai salah satu bagian dari unsur-unsur penegak hokum lainnya seperti jaksa dan hakim. Sebagai salah satu bagian dari system peradilan pidana, Polri berada pada bagian terdepan dalam proses penegakan hokum. Oleh sebab itu, fungsi penegakan hokum adalah penting. Karena kehadiran Polri dalam penegakanhukum langsung berhadapan dengan masyarakat, maka polri merupakan symbol dari system peradilan di Indonesia.

Fungsi Polri Sebagai alat Negara yang bertugas untuk memberikan *perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat*, dituntut untuk bersikap simpati dan empati. Dengan demikian kehadiran Polri dalam masyarakat akan semakin dibutuhkan sehingga citra Polri sebagai penegak hokum dimasyarakat menjadi lebih positif.

Gaya kepemimpinan

Kepemimpinan berkaitan dengan proses yang disengaja dari seseorang untuk mempengaruhi, membimbing serta memfasilitasi orang lain melakukan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan secara harfian berasal dari kata pimpin. Kata pimpin mengandung pengertian mengarahkan, membina atau mengatur, menuntun dan juga menunjukkan ataupun mempengaruhi.

Pemimpin mempunyai tanggung jawab baik secara fisik maupun spiritual terhadap keberhasilan aktivitas kerja dari yang dipimpin, sehingga menjadi pemimpin itu tidak mudah dan tidak akan setiap orang mempunyai kesamaan di dalam menjalankan ke-pemimpinannya.

Harsey dan Blanchard (1986:83-84) mengemukakan beberapa kompo nen utama dalam definisi kepe- mim- pinan antara lain: 1). Kepemimpinan adalah kegiatan dalam mempengaruhi orang lain untuk bekerja keras dengan penuh kemauan untuk tujuan kelompok; 2). Kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang lain agar ikut serta dalam mencapai tujuan umum 3).

kepemimpinan sebagai pengaruh antar pribadi yang terjadi pada suatu keadaan dan diarahkan melalui proses komunikasi kearah tercapainya suatu tujuan.

Pendapat di atas dapat disimpulkan kemampuan mempengaruhi orang lain merupakan unsur utama. Dengan kemampuan mempengaruhi tersebut orang lain akan menuruti dan mengikuti apa yang dianjurkan dan diperintahkan oleh seorang pemimpin.

Kapolri harus dapat mempengaruhi anggotanya ke arah positif untuk dapat menjalankan tugasnya sehingga memperoleh kinerja yang maksimal. Dalam melakukan kegiatan mempengaruhi seorang Kapolri memiliki gaya yang diterapkan yang disesuaikan dengan karakter, budaya dan suasana iklim institusi untuk mencapai tujuan tugas yang lebih lancar.

Pengertian nilai karakter

Pembahasan nilai karakter tidak lepas dari etika dan moral. Karakter, etika, dan moral saling terkait. Oleh karena itu ada baiknya sebelum menguraikan definisi Nilai Karakter, penulis menyampaikan secara singkat tentang etika dan moral. Etika merupakan cabang falsafah dan sekaligus suatu cabang dari ilmu-ilmu kemanusiaan (*humaniora*).

Dilihat dari cabang falsafah, etika membahas sistem-sistem pemikiran yang mendasar mengenai ajaran dan pandangan moral. Sebagai cabang ilmu, etika membahas bagaimana dan mengapa seseorang mengikuti suatu ajaran tertentu. Moral merupakan aturan-aturan normatif yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu yang terbatas oleh ruang dan waktu. Penerapan tata nilai moral dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat tertentu merupakan bidang kajian antropologi, sedangkan etika merupakan bidang kajian filsafat. Realitas moral dalam masyarakat dijelaskan melalui studi kritis yang dibidangi oleh etika. Jadi, studi kritis terhadap moralitas merupakan bidang etika, sehingga moral adalah objek material dari etika.

Jadi, akhlak atau moralitas merupakan seperangkat tata nilai yang sudah jadi dan siap pakai tanpa dibarengi dan bahkan terkesan menjauhi kritis. Sedangkan etika bertugas untuk mempertanyakan secara kritis rumusan-rumusan masa lalu yang sudah baku dalam masyarakat. Studi filsafat (etika) bukan tertuju pada karakter, tetapi pada isi karakter atau ajaran karakter. Hurlock, dalam bukunya, *personality Development*, secara tidak langsung mengungkapkan bahwa karakter terdapat pada kepribadian. Karakter melibatkan sebuah standar moral dan melibatkan sebuah pertimbangan nilai. Karakter berkaitan dengan tingkah laku yang diatur oleh upaya dan keinginan. Hati nurani sebuah unsur terpenting dari karakter, adalah sebuah pola kebiasaan perlarangan yang mengontrol tingkah laku seseorang, membuatnya menjadi selaras dengan pola-pola kelompok yang diterima secara sosial.

Dalam karakter terdapat ajaran moral dan standar moral, dan ada juga pertimbangan moral atau nilai yang menjadi komponen-komponen karakter. Pertimbangan nilai adalah sebuah pertimbangan tentang baik atau buruk sesuatu berdasarkan pandangan pribadi tentang moralitas. Selanjutnya, karakter berkaitan dengan tingkah laku yang diatur oleh upaya dan keinginan. Dengan demikian, karakter berkaitan dengan tingkah laku yang tidak otomatis dimiliki seseorang: ketika dilahirkan ia otomatis memilikinya dan ketika ia memerlukannya karakter muncul secara otomatis. Karakter diatur oleh upaya dan keinginan, yang mengasumsikan kebebasan manusia. Upaya dan keinginan tersebut diperoleh manusia melalui pengalaman dan pendidikan individu. Karakter adalah aspek tingkah laku hasil belajar, bukan tersedia secara genetik.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa karakter adalah sifat yang ada pada jiwa seseorang yang membentuk pribadi seseorang untuk merespon situasi. Sifat atau watak tersebut bersumber dari pengetahuan yang dimiliki dan telah menjadi komitmen, dan di munculkan dalam bentuk perilaku sehari-hari.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Strauss & Yuliet dalam Machfoedz (2013:132), penelitian kualitatif yaitu pendekatan

penelitian yang tidak melalui prosedur statistik dalam penemuan-penemuannya, namun penelitian yang lebih menekankan pada informasi dan data yang terkumpul berbentuk dalam kata-kata. Sehingga tidak menekankan pada angka.

Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses kegiatan yang dilakukan secara logis, sistematis, dan empiris terhadap masalah-masalah sosial yang terjadi pada suatu lingkungan untuk di rekonstruksi guna mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan. Masyarakat dan ilmu pengetahuan. Menurut Jacobs, Ary, dan Razavieh (2002: 421), penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman peristiwa sosial dari perspektif partisipan manusia.

Dari sudut pandang metodologis, pendekatan kualitatif adalah meng evaluasi pendapat, sikap, dan perspektif. Patton dan Cochran (2002:19), menyatakan sebagai berikut: *“a qualitative approach is an approach characterized by its aims, which are related to understanding some aspects of social life, and its methods which generate words, rather than numbers, as data for analysis. Generally, a qualitative approach aims to investigate the experiences, and attitudes of people”*.

Pernyataan di atas mengandung makna bahwa: “pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang dicirikan oleh tujuannya, yang berkaitan dengan pemahaman beberapa aspek kehidupan sosial, dan metodenya yang menghasilkan kata-kata, bukan angka, sebagai data untuk analisis. Umumnya, pendekatan kualitatif bertujuan untuk menyelidiki pengalaman, dan sikap orang.

Pendapat Burns dan Grove (2003: 63); *“describe a qualitative approach as, a systematic subjective approach used to describe life experiences and situations to give them meaning”* yang maksudnya adalah: “pendekatan kualitatif sebagai pendekatan subjektif sistematis yang digunakan untuk menggambarkan pengalaman dan situasi hidup untuk memberi mereka makna”

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu peneliti mengeksplorasi kepustakaan yang ada kaitannya dengan fenomena objek yang diteliti. Dalam hal ini penulis mengkaji bahan-bahan yang menyangkut yuridis-normatif dan dilengkapi dengan pendekatan historis dan yuridis. Selanjutnya hasil penelitian dipaparkan secara deskriptif. Menurut Nawawi L.H & Martini, M (1994:25-27)

Menentukan objek penelitian

Sebagai objek penelitian, penulis memilih 5 orang Jenderal Polisi yang pernah menjabat sebagai kapolri. Ke Lima Kapolri tersebut adalah:

1. Komisararis Jenderal Polisi R.S SoekantoTjokrodiatmodjo, Kapolri pada masa kemerdekaan yaitu dari tahun 1945-1959,
 2. Jenderal Hoegeng Imam Santoso, Kapolri ke 5 yaitu 1968 – 1971 (masa orde baru),
 3. Jenderal Polisi Widodo Budidarmo, Kapolri ke 7 yaitu dari tahun 1974 – 1978 (masa orde baru),
 4. Jenderal Polisi Anton Soedjarwo, Kapolri ke 9 yaitu dari tahun 1982 – 1986 (masa orde baru), dan
 5. Jenderal Polisi Dibyso Widodo, Kapolri ke 13 yaitu dari tahun 1996- 1998 (masa orde baru)
- Alasan penulis memilih ke 5 Jenderal di atas adalah karen hasil karya ke 5 Kapalri tersebut dikenal dikalangan Kepolisian dan rakyat Indonesia.

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam pendekatan kualitatif adalah dengan cara mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti pendapat para ahli maupun tokoh, bahan-bahan referensi, rangkuman, atau-pun laporan. Sedangkan bahan referensi yang berkaitan dengan hukum, bahan primer yang dipakai adalah UUD 45, TAP MPR maupun Undang-undang. Sedangkan bahan kajian yang menyangkut hukum sekunder yang dipakai antara lain seperti rancangan undang-undang hasil-hasil penelitian, maupun hasil karya dari kalangan hukum.

Selanjutnya penelitian ini juga menggunakan bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder antara lain; kamus, media informasi, informasi dari internet, dan sumber lain.

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari kajian literatur dan sumber lain ditelaah dan diolah terlebih dahulu oleh peneliti melalui proses pencatatan, penyuntingan, penyimpulan, dan pengetikan sehingga data tersebut siap di gunakan. Dalam mendeskripsikan data dan informasi yang didapat dalam penelitian ini, kemudian di analisis dengan analisis kualitatif dengan menggunakan kata-kata yang diperluas. Yang dimaksud analisis dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2012:334) adalah suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain. Semua analisis dan pendapat yang diperoleh akan digunakan untuk mengevaluasi pertanyaan penelitian.

Dari uraian metoda penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa latar belakang teori penelitian, metodologi dan desain dari penelitian ini dimaksudkan untuk mendukung pengumpulan data, informasi, dan pendapat dari para ahli tentang gaya kepemimpinan Kapolri dan nilai karakter di masa perjuangan kemerdekaan hingga masa orde baru. Oleh karena itu, semua teori dan temuan yang diperoleh dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang meliputi:

1. Gaya kepemimpinan dan nilai karakter apa yang diterapkan oleh Komisaris Jenderal Polisi R.S Soekanto Tjokrodiatmodjo, Jenderal Hoegeng Imam Santoso, Jenderal Polisi Widodo Budidarmo, Jenderal Polisi Anton Soedjarwo, dan Jenderal Polisi Diby Widoyo, selama menjabat Kapolri?
2. Apakah kebijakan dan hasil kepemimpinan Komisaris Jenderal Polisi R.S Soekanto Tjokrodiatmodjo, Jenderal Hoegeng Imam Santoso, Jenderal Polisi Widodo Budidarmo, Jenderal Polisi Anton Soedjarwo, dan Jenderal Polisi Diby Widoyo, diterapkan Polri pada masa kini?
3. Apakah nilai karakter apa yang ditunjukkan oleh Komisaris Jenderal Polisi R.S Soekanto Tjokrodiatmodjo, Jenderal Hoegeng Imam Santoso, Jenderal Polisi Widodo Budidarmo, Jenderal Polisi Anton Soedjarwo, dan Jenderal Polisi Diby Widoyo. dijadikan acuan oleh Kapolri di masa sekarang?

HASIL DAN DISKUSI

1. Kepemimpinan nilai karakter yang diterapkan; Pantang menyerah, tegas, disiplin, komit terhadap profesi, jujur, visioner, berani, gigih, konsisten, ikhlas, inovatif, kreatif, dan memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. santun dan terbuka. serta kepemimpinan yang identik dengan jiwa militer di mana Ke 5 (lima) mantan Kapolri tersebut menerapkan: disiplin, tegas, pemberani, gigih, pantang menyerah, komit terhadap profesinya, dan berjiwa nasionalisme yang tinggi
2. Hasil serta prestasi kerja meliputi terbentuknya struktur dan fundamen serta peletak batu persatuan bagi Kepolisian RI. Pendidikan Kepolisian, Penggunaan kata “Bhayangkara” slogan Tri Brata pada pataka Polri. Bendera pataka yang didalamnya memuat untaian kalimat “Rastra Sewakottama; Negara Sanotama; Yana Anucasma Dharma, terbentuknya sistem pelayanan, dan Satuan Polisi Perairan, Polisi Perintis, Polisi Udara, Polisi Lalu Lintas, laboratorium kriminal NCB Intepol dan Polisi Wanita, perubahan organisasi peran serta Polri dalam organisasi Polisi Internasional.
3. Prestasi kerja pada poin 2 di atas hingga saat ini masih diterapkan dan dikembangkan, serta mewariskan. sistem dan kebijakan pemberantasan korupsi, penyelundupan serta tindak

criminal lain, tertanamnya sikap melayani masyarakat, dan Samsat (Sistem administrasi satu atap).

SIMPULAN

1. Gaya kepemimpinan dan nilai karakter ke Kaporli meliputi keteladanan, tindakan nyata serta menerapkan semangat korps. disiplin, tegas, berani, gigih, pantang menyerah, komit terhadap profesinya, dan dengan jiwa nasionalisme tinggi.
2. Hasil serta prestasi kerja meli puti: fundamen institusi Polri, lam- bang-lambang, semboyan, sistem pe- layanan, peningkatan pelaksanaan tugas, pembentukan unit tugas dan peran dalam Polisi di tingkat Internasional.
3. Warisan sistem dan kebijakan meliputi: Semangat korps, Sekolah kepolisian, istilah “Bhayangkara”, semboyan Tri Brata, Satuan Polisi Perairan, Polisi Udara, Polisi Lalu Lintas, laboratorium kriminal NCB, Intepol dan Polisi Wanita., Struktur organisasi Mabes,

REFERENSI

- Abdullah I., & Safarina (2015). *Etika Pendidikan Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ancok, Djamaludin, A (2012). *Psikologi Kepemimpinan dan Inovasi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Daft, R.L., & Dorothy, M. (2008). *Management: The New Workplace*. United Kingdom: South-Western.
- Didin. H. (2003). *Islam Aplikatif*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Dharma, K. (2012). *Pendidikan Karakter Kajian Teori dan Praktik di Sekolah*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Greenberg, J., & Robert, A.B. (2008). *Behavior in Organizations: Understanding and Managing the Human Side of Work*. New Jersey: Pearson Education Inc.
- Hendri, T.A., & Ishak, (2003), *Manajemen Motivasi*, PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta.
- Heri. G. (2012). *Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi*. Bandung: Alfabeta.
- Hidayatullah, M. F. (2010). *Pendidikan karakter: Membangun peradaban bangsa*. Surakarta: Yuma Pustaka.
- Matta, M.A. (2003). *Membentuk karakter Islam*. Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat.
- Megawangi, R. (2004). *Pendidikan karakter solusi yang tepat untuk membangun bangsa*. Jakarta: Indonesia Heritage Foundation.
- Muchlas. S., & Hariyanto. (2010). *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*. Yogyakarta: Familia.
- Mulyasa, E. (2011). *Manajemen Pendidikan Karakter*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Narwanti, S. (2011). *Pendidikan karakter*. Yogyakarta: Familia
- Ratna, M. (2004). *Pendidikan Karakter Solusi yang Tepat untuk Membangun Bangsa*, Bogor: Indonesia Heritage Foundation.
- Robbins, S.P., & Timothy, A.J. (2015). *Organizational Behavior*, Sixteen Edition. Essex: Pearson Education Limited.
- Robins, S.P. (2003). *Perilaku Organisasi*, Terjemahan: Tim Indeks, Edisi Indonesia, Jakarta: PT. Indeks
- _____ (2001). *Organizational Behavior*. San Diego State University: Prentice Hall.
- Soehardi, S.A. (2010). *Polisi dan Kepemimpinan*. Semarang: PD PP Polri Jawa Tengah.
- Solikin (2019). *Pengaruh Peran Kepemimpinan dan Budaya Kerja Terhadap Kinerja Anggota Kepolisian Polres Kota Lampung Tengah*.
- Thoha M. (2007) *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Edisi 12, Jakarta: PT. Raja Grafind Persada.
- Tzu, S. (1993). *The Art of Warfare*, Translated and Commentary by Roger T. Ames, New York: Balantine Books.

- Wirawan, MSL. (2017). *Kepemimpinan; Teori, psikologi, perilaku organisasi, aplikasi dan penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Widjajakusuma, K., & Yusanto, I. (2002). *Pengantar Manajemen Syariah*, Jakarta: Khairul Bayan.
- Anggita, W.S (2018) *Kepemimpinan Sektor Publik dalam Sektor Kepolisian* (Studi pada Polsek Lawang Malang Jawa Timur)
- Yazib, H.M (2021). *Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Motivasi Terhadap Kinerja anggota Kepolisian dengan kedisiplinan sebagai variabel intervening di Polres Bojonegoro*.
- Yukl, G. (2005). *Kepemimpinan Dalam Organisasi*. Edisi kelima. Jakarta: Gramedia.